KPKNL
PALEMBANG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
JL. Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
TELP : (0711) 317146,
email:kpknlpalembang@kemenkeu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iii
PENGANTAR iv
IKHTISAR EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1
C. Isu Strategis Organisasi 6
D. Sistematika Laporan 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. Rencana Strategis 8
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 11
C. Pengukuran Kinerja 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang 17
B. Realisasi Anggaran 27
BAB IV PENUTUP 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 4
Tabel 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 4
Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur 4
Tabel 4 Pejabat Fungsional 4
Tabel 5 Sasaran Strategis KPKNL Palembang 11
Tabel 6 Capaian Kinerja KPKNL Palembang 2023 16
Tabel 7 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang .. 18
Tabel 8 Persentase produktifitas lelang 2023 18
Tabel 9 Realisasi Pokok Lelang 20
Tabel 10 Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) 20
Tabel 11 Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara 21
Tabel 12 Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK..... 21
Tabel 13 Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikasikan 22
Tabel 14 Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN 22
Tabel 15 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 22
Tabel 16 Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* 23
Tabel 17 Persentase pelaksanaan permohonan lelang online 23
Tabel 18 Presentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) 23
Tabel 19 Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset 24
Tabel 20 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 24
Tabel 21 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan..... 26
Tabel 22 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 26
Tabel 23 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 26
Tabel 24 Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2023 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Strutur Organisasi KPKNL Palembang 3
Gambar 2 Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023 11

PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB), bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palembang adalah 114,88% nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* sebesar 33,64%, *Customer Perfective* sebesar 24,00%, *Internal Process Perspective* sebesar 27,80%, *Learning and Growth Perspective* sebesar 29,43%, Selanjutnya, 9 Indikator Kinerja Utama (IKU), 19 IKU memenuhi target yang ditetapkan dan 1 IKU tidak memenuhi target oleh Kantor Pusat DJKN. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi dan dukungan yang baik dengan semua *stakeholders.* KPKNL Palembang menyambut positif hasil pencapaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholders* agar kinerja organisasi dapat semakin meningkat.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Kepala KPKNL Palembang

Mardhanus Rudiyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Palembang atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Palembang menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2023.

Visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Palembang mempunyai enam misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Palembang menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2020 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *stakeholder/customer, internal process*, dan *learning and growth.* Peta strategi terkait dengan KPKNL Palembang terdiri dari 4 (empat) Peta Strategi yaitu *Stakeholders Perspective, Customer Perspective, Internal process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective* dan sembilan sasaran strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Pengelolaan Kekayaan

Negara dan Lelang yang Optimal; (4) Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional; (5) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif; (6) Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif; (7) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal; (8) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif; (9) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C *(Specific, Masureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continously Improved)*. Pada tahun 2023 dihasilkan 20 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN SJB dengan Kepala KPKNL Palembang.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 sangat memuaskan yaitu dari total 9 IKU, 19 IKU berstatus hijau dan hanya 1 IKU dengan status kuning dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,88%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Palembang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palembang sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization)* semakin meningkat.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pepres Nomor 14 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent,* transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntablitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPKNL Palembang merupakan unit eselon III (tiga) di lingkungan DJKN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. KPKNL Palembang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palembang memiliki 6 (enam) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
f. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palembang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan pejabat fungsional yang terdiri dari:

a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
c. Seksi Piutang Negara;
d. Seksi Hukum dan Informasi;
e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
f. Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi KPKNL Palembang

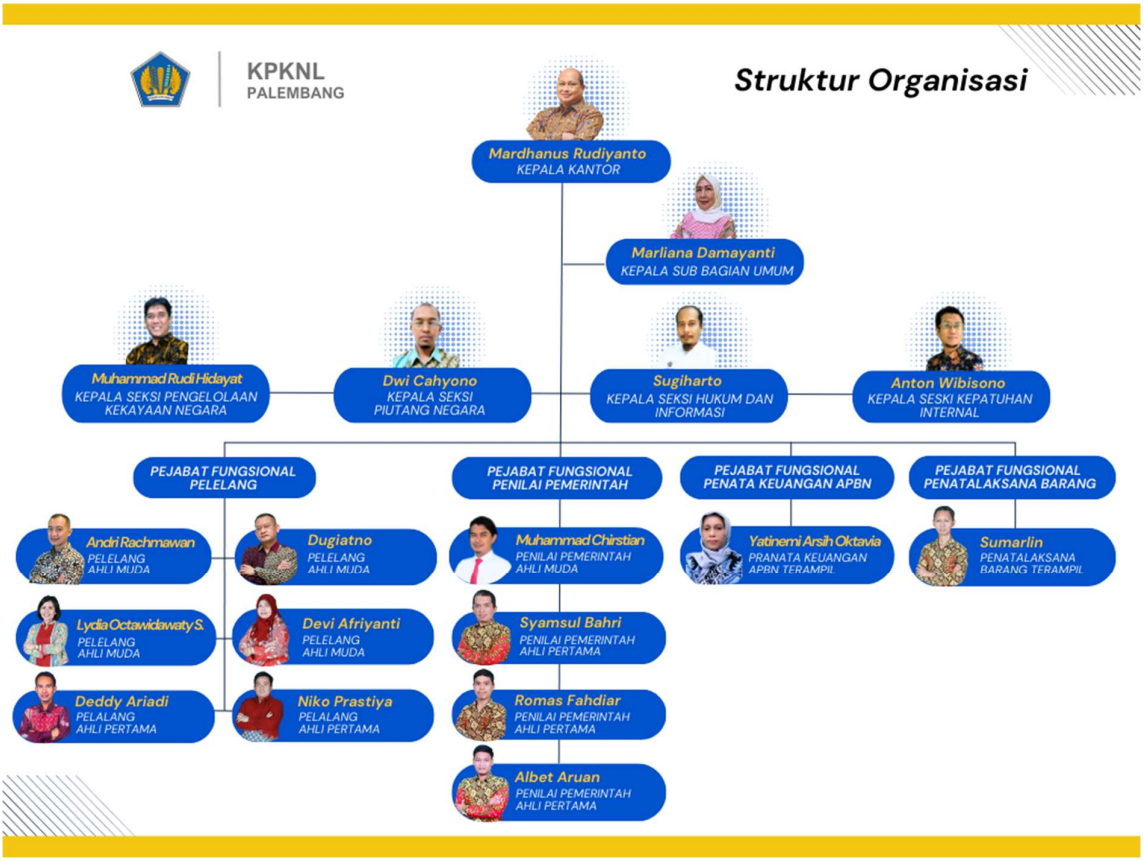

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Palembang didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain keuangan, hukum, ekonomi dsb. Adapun komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, umur dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	S2	S1/DIV	D3	D1	SMU	
KPKNL Palembang	6	15	8	1	6	36

Sumber : Data HRIS per Desember 2023

Tabel 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	JUMLAH
I	0
II	8
III	24
IV	4
JUMLAH	36

Sumber : Data HRIS per Desember 2023

Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
18-30	4
31-40	12
41-50	15
di atas 50	5
JUMLAH	36

Sumber : Data HRIS per Desember 2023

Tabel 4
Pejabat Fungsional

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pelelang	6
2	Penilai Pemerintah	4
3	Pranata Keuangan	1
4	Penata Laksana Barang	1
TOTAL		12

C. Isu Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palembang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamanatkan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. Komitmen DJKN dalam mencapai misi bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat menjadi salah satu proses bisnis di Kementerian Keuangan
5. Hasil revaluasi BMN tahun 2018-2019 dijadikan dasar untuk mengukur nilai BMN secara *up to date* dalam skala nasional di Indonesia.
6. Pengembangan teknologi di dalam organisasi untuk menciptakan suatu yang lebih praktis dan efisien khususnya dalam upaya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang
7. KPKNL Palembang memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNPBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

   Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan

   Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja

   Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2023.

5. Bab IV Penutup

   Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palembang pada tahun 2020-2024 adalah

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi Manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Palembang telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra KPKNL Palembang, terdapat sembilan sasaran, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan adalah:
   a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;
   b. Persentase produktivitas lelang; dan
   c. Indeks Integritas
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa adalah:
   a. Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan
   b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal adalah:
   a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan;
   b. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan; dan
   c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah:
   a. Deviasi ketergunaan hasil penilaian; dan
   b. Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif adalah:
   a. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction;
   b. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online; dan
   c. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif adalah:
    a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal adalah:
    a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;
    b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan; dan
    c. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN.
8. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif adalah:
    a. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif; dan
    b. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK.
9. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi adalah:
    a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Palembang. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Palembang yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
    a. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
    b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah:
    a. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang.
    b. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
    c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD.
    d. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang represetatif dan *marketable.*

3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah:

   Akuntabel, penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding.

   Efisien, pelaksanaan peilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.

4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:

   a. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.

   b. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.

   c. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.

   d. Penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi

   e. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palembang. Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palembang. Peta Strategi KPKNL Palembang Tahun 2023 memuat sebelas sasaran strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (4) Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional; (5) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif; (6) Pengawasan dan pengendalian Kekayaan

Negara yang efektif; (7) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal; (8) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif; (9) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Gambar 2
Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023

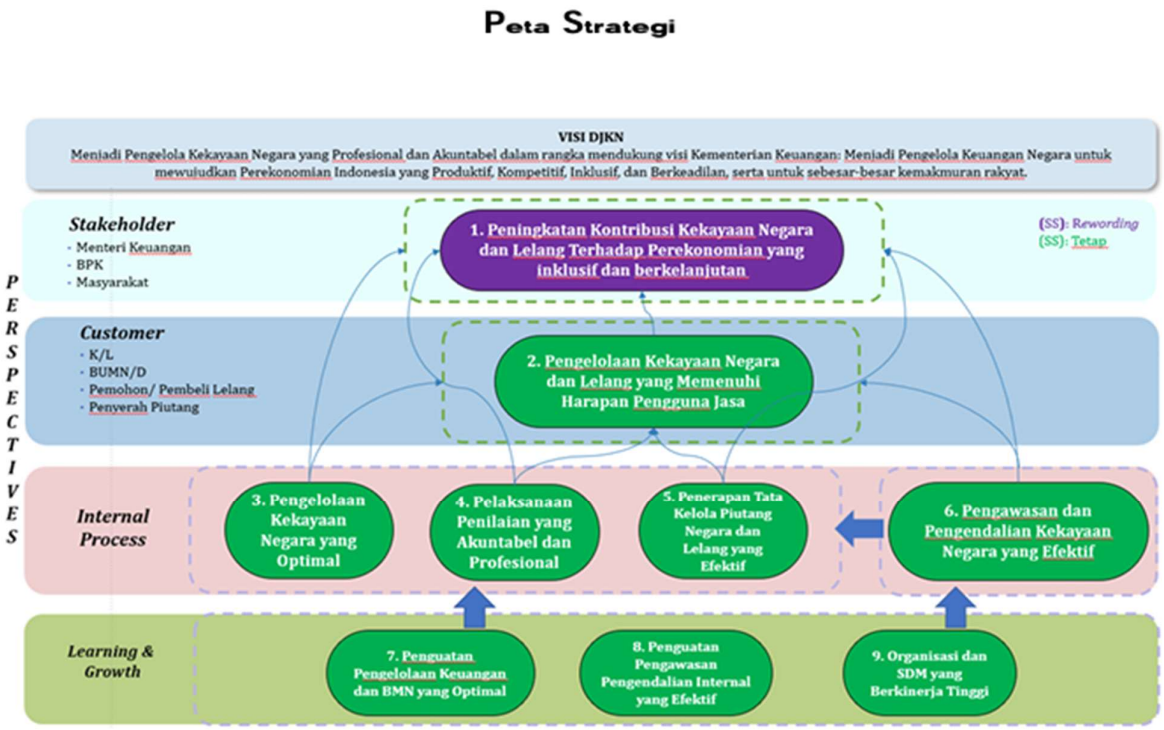

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. S*takeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2023 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Palembang terdapat 9 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5
Sasaran Strategis KPKNL Palembang

Kode	Sasaran Strategis	V/C	Target	Realisasi
	Stakeholder Perspective (30%)			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan			
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	150,59%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	141,68%
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17
	Customer Perspective (20%)			
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	144,21%
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	126,80%
	Internal Process Perspective (25%)			
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	68%	71,02%

Kode	Sasaran Strategis	V/C	Target	Realisasi
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100%	116,69%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	110,00%
4	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional			
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	1,25%
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	115,85
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif			
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100,00%
5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86,0%	100,00%
5c-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	100,00%
6	Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif			
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86%	91,94%
	Learning & Growth Perspective (25%)			
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			
7a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100%	99,65%
7b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	225,40%
7c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15,0%	6,00%
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif			
8a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	96,61
8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK	P/M	100	120
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, KPKNL Palembang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
   a). Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
   b). Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\textbf{Indeks Capaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times 100\ \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

Indeks Capaian = [1 + (1 – Realisasi/Target)] X 100%

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n}(C - C_n)$$

Dengan grafik sebagai berikut:

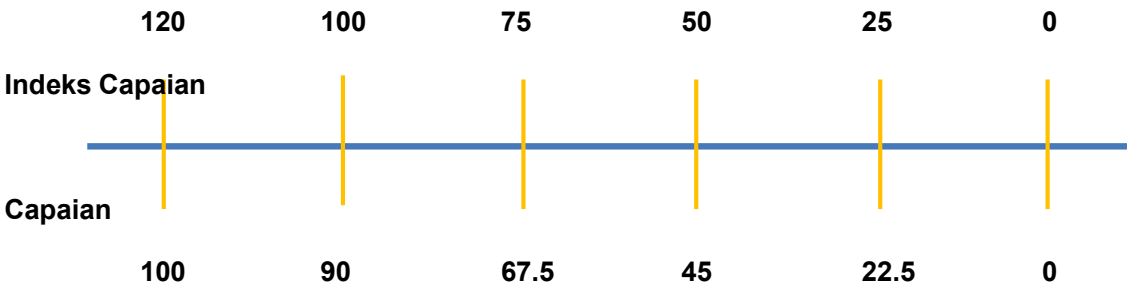

In = Indeks capaian

In-1 = Indeks capaian dibawahnya

In-1 = Indeks capaian diatasnya

Ca = Capaian awal

Ca = Realisasi/target x 100%

Cn = Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

Cn = 100 - (Ca - 100), dimana Ca maksimum adalah 200%

b. Apabila Realisasi < Target, maka :

Cn = Ca

Cn-1 = Capaian dibawahnya

Cn+1 = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2023 KPKNL Palembang telah menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini :

Tabel 6
Capaian IKU 2023

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)			33,64%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan			112,14%
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	150,59%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	141,68%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
	Customer Perspective(20%)			24,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			120,00%
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	144,21%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	126,80%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			27,80%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			110,37%
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	71,02%	104,43%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	116,69%	116,69%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	110,00%	110,00%
4	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan professional			120,00%
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	1,25%	120,00%

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	115,85	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif			107,55%
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	100,00%	106,38%
5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86,0%	100,00%	116,28%
5c-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	100,00%	100,00%
6	Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif			106,90%
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	91,94%	106,90%
	Learning & Growth Perspective (25%)			29,43%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			113,22%
7a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	99,65%	99,65%
7b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	225,40%	120,00%
7c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15,0%	6,00%	120,00%
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif			120,00%
8a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	96,61	120,00%
8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK	100	120	120,00%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			120,00%
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Palembang Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Palembang sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:**

    a. **Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Meliputi:

Capaian IKU (Target/Realisasi nominal PNBP Aset, PN dan Lelang) = 150,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Uraian	2023		
	Pengelolaan BMN	Piutang Negara	Lelang
Target	20,853,600,000	9,900,000	11,500,000,000
Realisasi	25,673,977,544	28,215,146	23,553,475,506
Capaian	121%	285%	205%

b. Persentase produktifitas lelang

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari produktifitas lelang dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Target/Realisasi

Pada tahun 2023, terdapat IKU Persentase produktifitas lelang yang diperoleh dari:

1) Jumlah Lot Lelang laku secara keseluruhan
2) Jumlah Lot Lelang secara keseluruhan

Kedua hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU Persentase produktifitas lelang, capaian sebesar 141,68% didapat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8
Persentase Produktifitas Lelang 2023

Jenis Lelang	Ket	Target	Realisasi		Realisasi %	Capaian	Indeks Capaian Max	Pembobotan	
			Laku	Total					
Lelang Non Eksekusi Sukarela		75%	58	59	98%	131,1%	105,0%		
Lelang Non Eksekusi Wajib	BMN, BMD, BB tidak diambil	55%	270	320	84%	153,4%	105,0%		
Lelang Eksekusi HT		5%	207	1362	15%	304,0%	105,0%		
Lelang Eksekusi Selain HT		25%	157	226	69%	277,9%	105,0%		
Total Capaian						245,1%	105,0%	40%	42,00%
Jumlah Frekuensi Lelang	*Jumlah Frekuensi s.d. saat ini		1967			1967			
Target Frekuensi Lelang	*Target=Realisasi Frekuensi 2022		1184			1184			
Capaian						166%		60%	99,7%
									141,68%

c. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari :

a. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel;
b. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

a. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain;
b. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I;
c. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi;
d. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode;
e. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- Internal
  - Perdagangan Pengaruh;
  - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Pengelolaan SDM;
  - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
  - Sosialisasi Antikorupsi; dan
  - Transparansi.
- Eksternal
  - Upaya Pencegahan Korupsi;
  - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
  - Integritas Pegawai.

2. **Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:**

a. Persentase realisasi pokok lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah pelaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkonstribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optim *Evaluasi Kinerja*

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Pada tahun 2023, terdapat IKU Persentase hasil Lelang yang diperoleh dari Persentase realisasi jumlah pokok lelang kelas I + Pegadaian terhadap target. Hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU Persentase hasil lelang. Untuk tahun 2023 sendiri, capaian sebesar 144,21% didapat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9
Realisasi Pokok Lelang

	Pokok Lelang 2023	
	Target	Realisasi
PL Kls I	288.700.000.000	420.491.128.183
Pegadaian	100.000.000.000	140.055.875.300
Total pokok Lelang 2022	388.700.000.000	560.547.003.483

Tabel 10
Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)

	2022	2023
Target	255.000.000.000	388.700.000.000
Realisasi	608.726.021.401	560.547.003.483
Capaian	238,72%	144,21%

b. Tingkat Penurunan outstanding piutang Negara

IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2023) Meliputi:

Capaian IKU (Target/Realisasi nominal Penurunan outstanding piutang Negara) = 126,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

	2022	2023
Target	5.026.000.000	2.004.000.000
Realisasi	8.015.073.849	2.541.060.138
Capaian	159,47%	126,80%

3. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satkeryang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang

Meliputi:

Capaian IKU (Target/Realisasi nominal BMN pada satker) = 104,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

	2022	2023
Target	62%	68%
Realisasi	78,07%	71,02%
Capaian	120,11%	104,43%

b. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Target/Realisasi*, Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Perbandingan antara realisasi kinerja persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

	2022	2023
Target	440	1,935
Realisasi	450	2350
Capaian	102.27%	116,69%

c. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Evaluasi Kinerja

Tahapan pengurusan piutang negara dimulai sejak diterimanya penyerahan piutang negara sampai dengan piutang negara dinyatakan lunas atau selesai. Pengurusan piutang negara dikatakan optimal apabila dapat menyelesaikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masih diurus oleh KPKNL, berhasil melakukan penagihan piutang negara, dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Target/Realisasi*, Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut.

Tabel 14
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

	2022	2023
Target	30	45
Realisasi	145	55
Capaian	483,33%	110,00%

4. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berupa:

a. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian meliputi Capaian IKU (Target/Realisasi jumlah deviasi ketergunaan hasil penilaian) sebesar 195,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

	2022	2023
Target	19%	25%
Realisasi	0,02%	1,25%
Capaian	120%	195,02%

b. Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Rata-Rata Indeks meliputi Capaian IKU (Target/Realisasi jumlah deviasi ketergunaan hasil penilaian) sebesar 165,50% dengan rincian sebagai berikut:

5. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama berupa:

a.* Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction

Target/Realisasi*, Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase implementasi e-auction dan dan e-conventional auction.

Pada tahun 2023, terdapat IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction yang diperoleh dari jumlah realisasi Frekuensi e-Auction dan jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction. Kedua hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction, capaian sebesar 106,38% didapat dengan rinciansebagai berikut.

Tabel 16
Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction	94%	100%	106,38%
Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction	-	-	-

b. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online

Target/Realisasi, Perbandingan dan Analisis Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja pelaksanaan permohonan lelang online.

Pada tahun 2023, terdapat IKU Persentase pelaksanaan permohonan lelang online yang diperoleh dari jumlah realisasi pelaksanaan permohonan lelang online. Hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU Persentase pelaksanaan lelang online, capaian sebesar 116,28% didapat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17
Persentase pelaksanaan permohonan lelang online

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	100%	116,28%

c. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) meliputi Capaian IKU (Target/Realisasi jumlah portofolio BMN pada satker) sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

	2022	2023
Target	238	169
Realisasi	324	169
Capaian	123,03%	100,00%

6. Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif dengan Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Target/Realisasi*, Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset

	2022	2023
Target	85%	86%
Realisasi	90,08%	91,94%
Capaian	105,97%	106,90%

7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama berupa:

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Evaluasi Kinerja

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Target/Realisasi, Perbandingan dan Analisis Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

	2022	2023
Target	95,5%	100%
Realisasi	93,45%	99,65%
Capaian	97,85%	99,65%

Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran atas pagu netto, efisiensi, dan pencapaian keluaran riil.

1) Penyerapan anggaran atas pagu netto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran yang tercantum dalam RKA-KL/DIPA tidak termasuk *self blocking*, hasil efisiensi dan dana khusus.

2) Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek perjalanan dinas, RDK, konsinyering, kudapan & makan siang rapat, langganan daya & jasa, honorarium.

3) Pencapaian keluaran riil adalah pencapaian atas barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran mengikuti SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan KPKNL Palembang.

- Penyebab keberhasilan kinerja antara lain :

a. Sinergi yang baik antara KPKNL Palembang dan *stakeholders* sehingga target dapattercapai.

b. Kerjasama (*teamwork*) internal yang solid untuk mendukung pelaksanaan tugas,pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.

c. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Kegiatan pembinaan yang dilakukan secara internal meliputi:

a. *Sharing knowledge* melalui rapat pembinaan, diskusi, sosialisasi internal

terhadapperaturan baru.

b. Mendorong pegawai untuk lebih kreatif dan berinovasi guna memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor serta pelayanan kepada *stakeholder*.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Evaluasi Kinerja

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuaiketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Target/Realisasi, Perbandingan dan Analisis Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untukKPKNL Palembang adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

	2022	2023
Target	100%	100%
Realisasi	104,98%	225,40%
Capaian	104,98%	225,40%

c. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Target/Realisasi

Deviasi data PNBP fungsional DJK terdiri dari deviasi data PNBP lelang dan deviasi data PNBP Piutang Negara. Secara keseluruhan target yang dicapai adalah sebanyak 120%.

Tabel 22
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Deviasi Data PNBP Lelang	15%	6,00%	120%
Deviasi Data PNBP Piutang Negara	15%	0,00%	120%
Rata-Rata Target	15%	6,00%	120%

8. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berupa:

a. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

b. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK

9. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dengan Indikator Kinerja Utama Persentase pengembangan kompetensi pegawai berupa

Target/Realisasi*, Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Perbandingan antara realisasi kinerja Persentase pengembangan kompetensi pegawai, ***hard competency*** dan ***soft competency*** serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

	2022	2023
Target	100%	100%
Realisasi	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai seluruh kegiatan KPKNL Palembang pada tahun 2023, telah dialokasikan DIPA (setelah direvisi) sebesar Rp 5.517.812.000 Dilihat dari nilai capaian program pelaksanaan penggunaan DIPA, secara umum KPKNL Palembang tidak mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan kegiatan kantor.

Tabel 24
Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2023

Jenis Belanja	**Pagu (Rp)**	**Realisasi s.d 31 Des 2023**	
		(Rp)	%
Belanja Modal	3.226.883.000	2.865.079.259	88.79%
Belanja Barang	2.290.929.000	1.909.614.982	83.36%
Jumlah	5.517.812.000	4.774.694.241	86.53%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palembang pada tahun 2023 secara umum dapat dikatakan baik karena 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Palembang berwarna hijau dan hanya 1 (satu) yang masih kuning dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,88%.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang diterapkan oleh KPKNL Palembang adalah :

1. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis antara KPKNL dan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sehingga target dapat tercapai.
2. Melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
3. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Palembang.
4. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
    a. koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KPKNL dengan para pemangku kepentingan;
    b. peningkatan *self awarness* Satuan Kerja terkait dengan optimalisasi Barang Milik Negara, termasuk dalam peningkatan PNBP dari pengelolaan BMN;
6. Terkait pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
    a. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding; dan
    b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
7. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
    a. melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur/Penanggung Hutang agar tetap melunasi/mengangsur hutangnya;

b. melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah terus ditingkatkan kepada penyerah piutang; dan

c. melakukan koordinasi dengan pihak BPN untuk mengetahui letak barang jaminan khususnya tanah dan bangunan, meminta pendampingan Penyerah Piutang dalam pelaksanaan Penyitaan.

8. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:

   a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD; dan

   b. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang represetatif dan *marketable.*

9. Selalu berupaya untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Segala yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama semua pegawai KPKNL Palembang, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Palembang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Palembang ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal diatasnya maupun semua jajaran di lingkungan KPKNL Palembang. Akhir kata “Tiada gading yang tak retak”, KPKNL Palembangdengan kerendahan hati menerima saran/masukan yang konstruktif untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.

LAMPIRAN
Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							33,64%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan							112,14%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	150,59%	14%	30%	150,588%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	141,68%	14%	30%	177,10%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)							24,00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	144,21%	14%	50%	144,21%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	126,80%	14%	50%	126,80%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							27,80%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							110,37%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	68%	71,02%	19%	37%	104,43%	104,43%	hijau
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/L	100%	116,69%	19%	37%	116,69%	116,69%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	110,00%	14%	27%	110,00%	110,00%	hijau
4	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional							120,00%	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	1,25%	14%	50%	195,02%	120,00%	hijau
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	P/M	70	115,85	14%	50%	165,50%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif							107,55%	
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100,00%	14%	33%	106,38%	106,38%	hijau
5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	P/M	86,0%	100,00%	14%	33%	116,28%	116,28%	hijau
5c-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	100,00%	14%	33%	100,00%	100,00%	hijau
6	Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							106,90%	
6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	86%	91,94%	14%	100%	106,90%	106,90%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,43%	
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							113,22%	
7a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100%	99,65%	14%	33%	99,65%	99,65%	kuning
7b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	225,40%	14%	33%	225,40%	120,00%	hijau
7c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	15,0%	6,00%	14%	33%	160,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif							120,00%	
8a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	96,61	14%	50%	161,02%	120,00%	hijau
8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK	P/M	100	120	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							120,00%	
9a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								**114,88%**	hijau

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja KPKNL Palembang
Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WKN.04/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2023

Peta Strategi

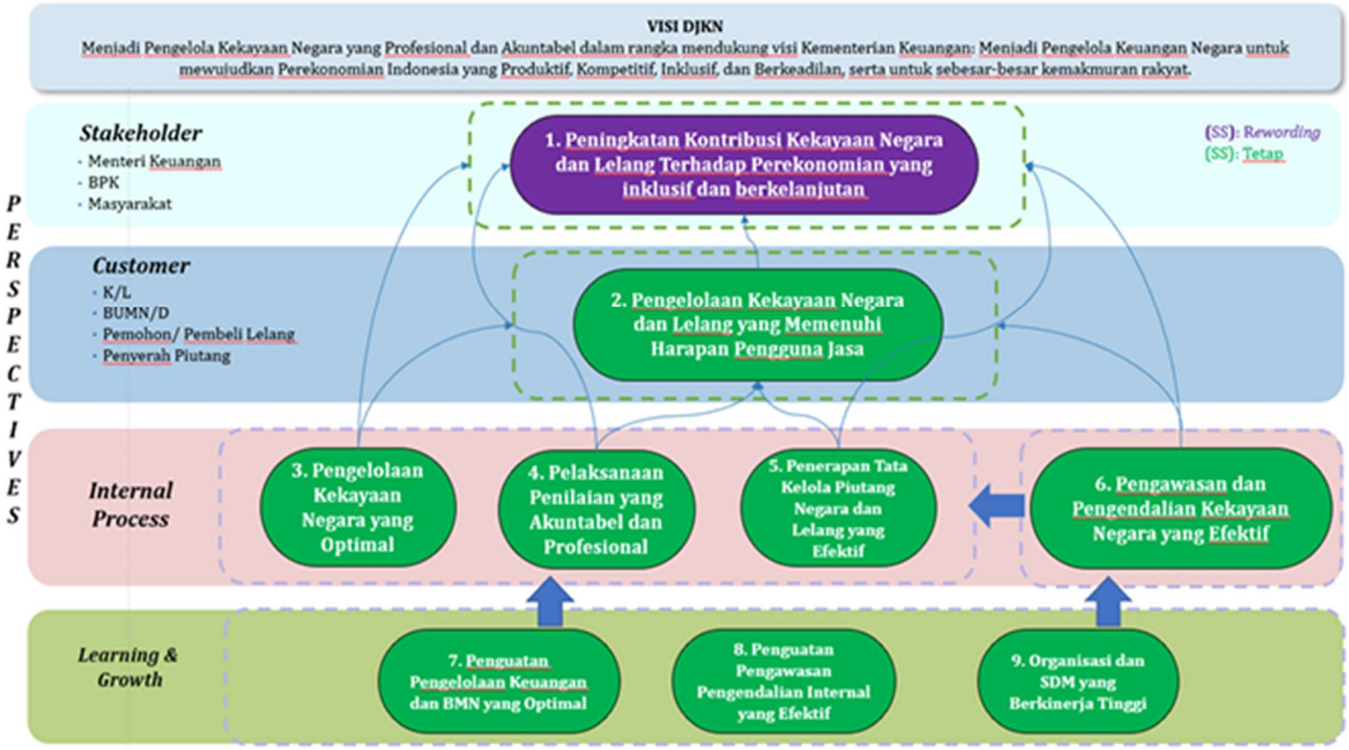

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
		3d-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25
		4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94
		5b-CP Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86
		5c-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan	7a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan	95,5

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7b-CP persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
8	Penguatan Pengawasan-	8a-CP Indeks Integritas	88,67
	Pengendalian Internal yang Efektif	8b-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (level 4)
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		9b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK	100

	Program/ Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisas	Rp	6.674.000
2	Pengelolaan Aset	Rp	627.730.000
3	Legislasi dan Litigasi	Rp	11.664.000
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.577.018.000
5	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	3.704.000
6	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	6.280.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang

Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	68	68
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
3d-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25	25	25	25	25	25	25
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94	94
5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20	40	40	63	63	86	86
5c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		40	40		40	86	86
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
7b-CP	persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
8a-CP	Indeks Integritas						88,67	88,67
8b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP						100 (level 4)	100 (level 4)
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
9a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK						100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Palembang,

Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output*/ *Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (R
				Kegiatan	Output			
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang

Ditandatangani Secara Elektronik

Mardhanus Rudiyanto

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Mardhanus Rudiyanto, S.E., M.M.	NAMA	Surya Hadi
NIP	197403161998031001	NIP	196304211992031002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Banka Belitung)	Persentase Produktivitas Lelang	80	Penerima Layanan

3.	Pengelolaan Kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis

9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86	Proses Bisnis
13.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis

14.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran

20.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung)	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
1.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	Penguatan Internal
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
PERILAKU KERJA				
3	Kompeten			

	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terusmenerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
PERILAKU KERJA		

	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Palembang, 1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Surya Hadi
NIP 196304211992031002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	39 pegawai
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1 Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
2	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
5	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	68	68
6	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100

8	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
9	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25	25	25	25	25	25	25
10	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94	94
12	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20	40	40	63	63	86	86
13	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
14	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		40	40			86	86
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
16	persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
17	Indeks Integritas						88,67	88,67
18	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP						100 (Level 4)	100 (Level 4)
19	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
20	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK						100	100

KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,	Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto	Surya Hadi
NIP 197403161998031001	NIP 196304211992031002